

## KETERSEDIAAN VAKSIN DI SLEMAN TERBATAS

# Vaksinasi Diprioritaskan untuk Dosis Kedua

**SLEMAN (KR)** - Ketersediaan vaksin di Kabupaten Sleman akan diprioritaskan untuk vaksinasi dosis kedua. Hal itu mengingat ketersediaan vaksin minggu ini hanya sebanyak 15.000 dosis, sehingga penggunaannya akan diprioritaskan untuk menyelesaikan vaksinasi dosis kedua.

Hal tersebut disampaikan Sekda Sleman Harda Kiswaya di Pendapa Parasamya Setda Sleman, Senin (2/8). "Prioritas tersebut dikarenakan ketersediaan vaksin yang terbatas di Kabupaten Sleman. Di samping itu, antusias masyarakat dalam ikut program vaksinasi saat ini terbilang sangat tinggi. Kami sangat bersyukur karena kesadaran yang tinggi dari masyarakat terkait vaksin," katanya.

Hal senada disampaikan Plh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman dr Cahya Purnama MKes

yang menyebutkan, tingginya permintaan vaksinasi dari masyarakat disebabkan tingginya kasus Covid-19 beberapa waktu lalu di wilayah Sleman. "Keinginan tinggi masyarakat untuk divaksin menjadi respons alamiah mengingat beberapa saat ini terjadi peningkatan kasus terjadi drastis sehingga kita harus menerapkan PPKM Darurat," jelasnya.

Menurut Cahya, dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan adalah menyelesaikan vaksin kedua sambil menunggu dropping dari pusat. "Begitu ada (vaksin) nanti kita juga mulai untuk mengejar dosis yang pertama lagi, karena Menteri mewacanakan cakupan vaksinasi harus terselesaikan tahun ini. Saat ini cakupan vaksin Sleman sebesar 39,7%," tuturnya.

Kabid Penanggulangan Penyakit Dinkes Sleman Novita Krisnaeni menambahkan, saat ini Pemkab

Sleman telah menerima 15.400 dosis Aztec dan 1.000 dosis Sinovac dari Pemerintah Pusat.

"Masyarakat tidak usah khawatir, yang sudah dapat dosis pertama akan tetap dilayani untuk dosis kedua. Untuk vaksin AstraZeneca mulai disuntikkan di bulan Mei, nanti di bulan Agustus sudah harus divaksin kembali, sehingga untuk bulan Agustus ini akan mulai menggunakan vaksin Aztec untuk dosis kedua," jelasnya.

Menurut Novi, pada pekan ini vaksinasi bagi dosis pertama belum dimulai dan baru mengusulkan untuk mahasiswa dan keluarga UGM sebanyak 25.000 dosis, perguruan tinggi lainnya 60.000 dosis dan untuk masyarakat umum 160.000 dosis. "Begitu ada ketersediaan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat, langsung kita laksanakan vaksinasi kembali," tegasnya. (Has)-d



Sekda Harda Kiswaya dan Plh Kadinkes dr Cahya Purnama saat memberikan keterangan pers.

## BANYAK MELANGGAR JAM OPERASIONAL

### Usaha Kuliner Sasaran Penegakan Prokes



KR-Istimewa

#### Aparat gabungan menasar usaha kuliner.

**SLEMAN (KR)** - Upaya penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di Sleman terus digencarkan. Seperti yang dilakukan Sabtu (31/7) malam, personel gabungan menasar sejumlah warung makan di wilayah Kapanewon Seyegan, Godean, Gamping dan Mlati.

Plt Kasat Pol PP Sleman Susmiyanto menjelaskan, meski sudah cukup lama PPKM Darurat yang kemudian diperpanjang dengan PPKM Level 4, namun kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi prokes masih sangat kurang. "Masih banyak pelaku usaha kuliner yang beroperasi melebihi pukul 20.00. Selain itu masih banyak pengunjung yang makan dan minum di tempat," ungkapnya, Senin (2/8).

Kepada pemilik usaha yang kepadatan melanggar aturan, petugas langsung melakukan sosialisasi dasar hukum penegakan protokol kesehatan. Petugas juga menempel leaflet PPKM Level 4 di tempat usaha tersebut. "Selain itu, pengujung yang masih makan dan minum di tempat, saat itu juga diminta meninggalkan tempat atau dibubarkan," tandas Susmiyanto.

Adapun lokasi usaha kuliner yang menjadi sasaran penegakan protokol kesehatan di antaranya Bakmi Jawa E-Tan Gentong Jalan Kebon Agung Cabakan Sumberadi Mlati, Warmindo Himah Jalan Kebon Agung Cabakan Sumberadi Mlati, C. Angkringan Selokan Resto Kadipiro Margodadi Seyegan, Pasar Kuliner Sidoarum Jalan Godean KM 7 Sidoarum, Godean, Kedai Ratu Jalan Kabupaten Nogotirto Gamping, dan Kopi Lhiyud Jalan Kabupaten Trihanggo Gamping. "Giat penegakan protokol kesehatan ini melibatkan personel Sat Pol PP sebanyak 11 orang, Kodim 2 personel, Polres 2 personel, Dispar 2 personel, Disperindag 2 personel dan Linmas Inti 2 personel," tambah Susmiyanto. (Has)-d

## HARI INI UJIAN TES TERTULIS

# Pelaksanaan Pilur Diundur 12 September

**SLEMAN (KR)** - Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Lurah (Pilur) di 35 kalurahan ditunda pada 12 September 2021 mendatang. Hal itu dikarenakan ada beberapa tahapan yang tidak dapat dilaksanakan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat kemarin.

Sedangkan untuk pelaksanaan ujian tertulis bagi kalurahan yang calonnya lebih dari lima orang, akan dilaksanakan hari ini, Selasa (3/8) di Pemkab Sleman.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman Budiharjo mengatakan, awalnya Pemkab Sleman telah menjadwalkan pemungutan suara Pilur di 35 kalurahan pada 22 Agustus 2021. Namun diundur dengan adanya SE Kemendagri No 141/3170/BPD tentang penundaan pelaksanaan Pilkada secara serentak dan

Pemilihan Antar Waktu se-Jawa dan Bali. Dalam surat menyebutkan, semua kegiatan pilkades atau pilur yang berpotensi untuk menimbulkan kerumunan selama PPKM Darurat diminta untuk menunda dulu.

"Dengan adanya surat itu, ada beberapa tahapan yang tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya pelaksanaan pemungutan suara Pilur kami tunda pada 12 September 2021 mendatang," kata Budiharjo di kantornya, Senin (2/8).

Dengan pemungutan suara pada 12 September 2021, diharap-

kan nantinya tidak ada Penjabat (Pj) lurah. Dimana para lurah di 35 kalurahan akan berakhir masa jabatannya pada 15 September mendatang. "Kami targetkan untuk pelantikan calon lurah terpilih pada 15 atau 16 September 2021. Supaya nanti tidak perlu ada Pj lurah," terangnya.

Untuk kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akan dimulai kembali. Di antaranya pelaksanaan ujian tertulis bagi kalurahan yang calonnya lebih dari lima orang. Yakni Trihanggo Gamping 8 orang, Margomulyo Seyegan 8 orang, Sendang Mlati 8 orang, Trimulyo Sleman 6 orang. "Pelaksanaan ujian tertulis ini sebenarnya dijadwalkan 15 Juli lalu. Tapi karena ada PPKM Darurat Jawa-Bali, akhirnya kami laksanakan besok pagi (hari ini) di Pemkab Sleman," ujarnya.

Kabid Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman Agung Endarto menambahkan, untuk seleksi tambahan, materi pembobotan tentang usia, tingkat pendidikan, masa kerja pengabdian di pemerintahan memiliki bobot 60 persen. Sedangkan ujian tertulis yang terdiri dari pengetahuan umum dan pemerintahan 40 persen.

"Ujian tertulis ini diselenggarakan di Pemkab bekerja sama dengan perguruan tinggi. Nanti yang membuat soal dan koreksi dari perguruan tinggi. Kemudian hasil ujian tertulis akan diserahkan ke panitia kalurahan untuk digabungkan dengan nilai pembobotan usia, pendidikan dan pengabdian di pemerintahan," pungkasnya. (Sni)-d

# Pasien Non-Covid Sempat Kesulitan Cari Rumah Sakit

**SLEMAN (KR)** - Meningkatnya kasus positif Covid-19 membuat pelayanan kesehatan di rumah sakit kewalahan. Akibatnya, banyak pasien non-Covid yang ditolak saat hendak berobat di rumah sakit. Bahkan cukup banyak pasien yang telantar dan kesulitan mencari rumah sakit yang mau merawatnya.

Kesulitan mencari rumah sakit yang mau merawat pasien non-

Covid ini banyak muncul di media sosial sekitar bulan Juni - Juli. Saat itu kebetulan kasus positif Covid-19 melonjak tajam, sehingga rumah sakit terlihat lebih memomersatukan pasien Covid-19.

Saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Kesehatan Sleman dr Joko Hastaryo minta maaf kepada masyarakat karena pada periode tersebut rumah sakit sedang menghadapi lonjakan ka-

sus Covid-19. Dampaknya, rumah sakit lebih fokus melayani pasien Covid-19. Bahkan jumlah bed di rumah sakit untuk pasien Covid-19 juga dinaikkan dari sebelumnya hanya 24 persen menjadi 30 persen.

"Yang jadi masalah itu kalau pasien datangnya ke rumah sakit di luar jam kerja poliklinik. Mengingat pelayanan di luar jam kerja tersebut tidak bisa maksimal

lagi. Namun sebenarnya sudah ada beberapa rumah sakit yang memisahkan poliklinik non-Covid dengan pelayanan pasien Covid-19," kata Joko.

Seiring dengan penurunan kasus Covid-19, Joko berharap pelayanan rumah sakit untuk pasien non-Covid bisa normal lagi. Sehingga pasien non-Covid kembali mendapat pelayanan semestinya dari rumah sakit. (Has)-d



# DPRD KABUPATEN SLEMAN SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp. (0274)868413, Fax (0274)868413

## KINERJA KOMISI B DPRD KABUPATEN SLEMAN

# Penguatan Modal bagi Pelaku Usaha Terdampak PPKM

**SLEMAN (KR)** - Para pelaku usaha banyak yang mengibarkan bendera putih sebagai lambang menyerah akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat maupun Level 4. Untuk membangkitkan ekonomi, pemerintah perlu memberikan penguatan modal bagi pelaku usaha, baik UKM maupun pelaku pariwisata di Kabupaten Sleman.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sleman Banudoyo Manggolo SKom mengatakan, PPKM Darurat dan Level 4 menjadi pukulan berat bagi pelaku usaha. Bagaimana tidak, ekonomi yang mulai merangkit bangkit justru harus ambruk karena ada PPKM Darurat.

"Dengan banyaknya pelaku usaha yang mengibarkan bendera putih, bahwa mereka tak berdaya lagi. Adanya PPKM

darurat maupun level 4 sangat berpengaruh terhadap usaha mereka," kata Banudoyo kepada KR, Senin (2/8).

Memang saat ini aturan PPKM Level 4 tidak begitu ketat jika dibandingkan dengan PPKM Darurat kemarin. Meskipun demikian, masih belum mengembalikan perekonomian para pelaku usaha, khususnya UKM. "Untuk para pedagang makanan memang sudah ada kelonggaran makan di tempat dengan pembatasan pengunjung dan waktu makan. Tapi kebijakan tetap masih dikeluhkan para pedagang atau pelaku usaha karena masih sepi pembeli," ujarnya.

Dengan kondisi seperti ini, membuat modal para pelaku usaha berkurang. Bagaimana tidak, pendapatnya berkurang, namun kebutuhan hidup masih terus berjalan. "Pelaku



Banudoyo Manggolo SKom

usaha harus tetap mengaji karyawan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara penghasilannya berkurang. Otomatis akan mengurangi modal usaha pelaku usaha," kata Banudoyo.

Bahkan yang paling terasa adalah pelaku pariwisata. Selama PPKM Darurat dan Level 4, tempat-tempat pariwisata di Kabupaten Sleman ditu-

put. Otomatis para pelaku pariwisata tidak mendapat penghasilan. "Pelaku pariwisata sangat berat menghadapi PPKM ini. Mereka mendapat pemasukan dari mana, karena tidak ada wisatawan yang datang ke Sleman," kata anggota Fraksi Golkar ini.

Untuk itu, Banudoyo mengharapkan ada penguatan modal bagi pelaku usaha, baik pedagang maupun pelaku pariwisata. Dengan harapan para pelaku usaha ini nantinya tetap dapat bertahan menghadapi pandemi Covid-19. "Saya berharap pemerintah menganggarkan dana untuk penguatan modal bagi pelaku usaha. Kalau tidak, mereka bisa gulung tikar karena kehabisan modal," tuturnya.

Mekanisme pemberian penguatan modal, bisa melalui paguyuban atau koperasi pelaku usaha

yang telah berbadan hukum. Harapannya pemberian penguatan modal bisa tepat sasaran. "Kalau pemberian modal itu melalui paguyuban atau koperasi, akan mudah memantaunya. Termasuk pelaku usaha itu pantas diberi penguatan modal atau tidak. Sehingga penguatan modal ini tepat sasaran sesuai dengan tujuan awal," papar Banu.

Dengan adanya penguatan modal dari peme-

rintah, diharapkan roda perekonomian kembali bangkit. Apalagi pemerintah pusat juga telah menyalurkan bantuan kepada warga terdampak PPKM maupun warga miskin dan rentan miskin. "Bantuan bagi warga sudah mulai disalurkan. Kalau nanti pelaku usaha juga diberikan penguatan modal, kami optimis perekonomian bisa kembali bangkit," pungkasnya. (Sni)-d



Ketua Komisi B Nurhidayat didampingi Banudoyo saat memimpin rapat dengan anggota.



Komis B saat melakukan monitoring di Bank Sleman Cabang Godean.